**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU
YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*YOUTUBE*)
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Inka Alpiani¹, Yuniar Rahmatiar², Farhan Asyhadi³

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹Hk19.inkaalpiani@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Yuniar.rahmatiar@ubpkarawang.ac.id

³Farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia Hak Cipta dan Hak Terkait sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, kini mendapat tempat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan hak cipta sebelumnya. Pada masa sekarang siapa pun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-dilindungi hak cipta. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan ini memacu pertumbuhan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu hak karya cipta yang dipublikasikan melalui media sosial dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum mengenai hak karya cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial (*Youtube*) serta untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak karya cipta. Adapun Hasil penelitian ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi hak cipta dalam hal lagu yang dipublikasikan melalui media sosial seperti *YouTube* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt Sus-HKI/2021, antara Pt Nagaswara Publisherindo dan Gen Halintar, menurut peneliti telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ABSTRACT

In Indonesia Copyrights and Related Rights as part of Intellectual Property Rights, now have a place of regulation in Law number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright law that is further enhanced from the previous copyright laws and regulations. At the present time anyone is aware, advances in technology and information have made such a large contribution to the globalization of trade in various works protected by copyright. The globalization of trade in various works has spurred an increase in demand for quality works, such as books, music, cinematography and computer programs. The issues raised in this study are how the legal protection of a copyright work that is published through social media and how the judge considers in decision number 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. The purpose of this research was conducted to find out legal protection regarding copyright in the form of songs published via social media (Youtube) and to find out the considerations of the panel of judges in case decision number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. The research method used is normative juridical using statutory approaches and legal concepts related to legal protection of copyrights. The hypothesis of this research is that Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright provides strong legal protection for copyrights in the case of songs published through social media such as YouTube. Supreme Court Decision Number 41 PK/Pdt Sus-HKI/2021, between Pt Nagaswara Publisherindo and Gen Halintar, according to researchers, is in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual terus berkembang dan menimbulkan kesadaran bagi negara-negara di dunia bahwa hasil kekayaan intelektual penting untuk dilindungi. Kesadaran ini muncul tak lepas dari kesadaran masyarakat dunia mengenai nilai ekonomi dalam suatu hak kekayaan intelektual. Dunia kreatif seperti musik dan film yang pada masanya mulai terkomersialisasi secara masif tentu merasakan dampak yang luas dari situasi ini. Negara-negara maju

seperti Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam perkembangan dunia bisnis pertunjukan tentu tidak ingin hasil karya seniman-senimannya mulai dari film maupun musik ditiru oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Potensi ekonomi yang dapat dinikmati oleh seniman-seniman tentu juga akan berpengaruh pada perkembangan perekonomian suatu negara. Untuk itu, pemikiran mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual semakin menghangat khususnya di abad ke 19.¹

¹Sujana Donadi, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Right Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 7

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

Suatu hak kekayaan intelektual mempunyai arti ekonomi apabila diijelmakan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati oleh pengguna. Di samping itu, pemanfaatan hak kekayaan intelektual dapat juga dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi sehingga ciptaan atau lisensi ini dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasanyang lebih luas secara nasional dan/atau internasional. Lisensi adalah pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual seseorang. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.²

Dengan ini hak kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi, dan juga biaya.³ Atas eksistensinya, suatu Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi. Namun, nilai ekonomi itu hanya muncul jika hak kekayaan intelektual telah disuguhkan dalam bentuk yang nyata yang dapat diakses oleh pihak lain untuk membuktikan eksistensinya. Dengan kata lain, jika suatu hak kekayaan intelektual baru merupakan ide, ia dianggap belum memiliki nilai ekonomi. Perwujudan nyata suatu hak kekayaan intelektual juga merupakan syarat bagi suatu hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁴

Di Indonesia hak cipta dan hak terkait sebagai bagian dari hak Kekayaan intelektual, kini mendapat tempat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

² Abdulkadir Muhamad, “*Hukum Kekayaan Intelektual*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.9

³ Abdul Atsar, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 21

⁴Sujana Donadi, *Loc. Cit*, hlm.14-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

Hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan hak cipta sebelumnya. Maksudnya adalah untuk mewujudkan iklim lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra disertai peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, yang diperlukan bagi pembangunan nasional.⁵

Pada masa sekarang siapapun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan dilindungi hak cipta. Globalisasi perdagangan berbagai ciptaan ini memacu pertambahan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu misalnya ciptaan-ciptaan buku, musik, sinematografi dan program komputer.⁶

Dalam era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi salah satu sarana yang paling efektif dalam menyebarkan karya cipta, seperti tulisan,

foto, musik, dan video. Dalam hal ini, muncul pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dari karya-karya yang dipublikasikan melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pencipta karya cipta, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk memanfaatkan karya cipta yang telah dihasilkan.

Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mempublikasikan karya cipta memiliki tantangan tersendiri, seperti sulitnya mengendalikan dan mengawasi penggunaan karya cipta di media sosial. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak karya cipta yang dipublikasikan melalui media sosial menjadi sangat penting. Mahasiswa hukum dapat mengkaji lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum tersebut, terutama terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini dapat memberikan

⁵Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2022, hlm. 3

⁶*Ibid*, hlm. 4

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan regulasi yang lebih baik terkait dengan penggunaan karya cipta di media sosial. Hal ini penting untuk melindungi hak pencipta dan mendorong perkembangan kreativitas dalam era digital yang semakin maju.

Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam industri musik yang berhak dalam memproduksi, memasarkan, dan mendistribusi sebuah lagu adalah si pencipta lagu dan produser dari label rekaman tempat si pencipta lagu bernaung. Seperti yang kita ketahui biasanya pencipta lagu bekerja di bawah naungan sebuah label rekaman, dan terdapat beberapa pencipta lagu yang bekerja secara independen atau biasa disebut dengan penyanyi/band yang tidak

bekerja di bawah sebuah naungan label rekaman, akan tetapi menggunakan label rekaman merupakan hal yang wajar dalam dunia industri musik guna mempermudah dalam hal perizinan dan periklanan karya musik.⁷

Penggunaan media sosial sebagai platform untuk mempublikasikan lagu atau karya cipta semakin populer di era digital saat ini. Namun, publikasi lagu melalui media sosial seperti *YouTube* juga membuka celah bagi pelanggaran hak cipta yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup hak eksklusif atas karya cipta, seperti hak reproduksi, hak distribusi, hak publikasi, hak pemanfaatan, dan hak moral. Penggunaan lagu tanpa izin dari pemilik

⁷ Martin Eka Dwi Chandra, *“Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube*

Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2021, hlm. 4

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi pidana atau denda.

Pada saat mempublikasikan lagu melalui media sosial seperti *YouTube*, penting untuk memastikan bahwa ada izin dari pemilik hak cipta. Jika tidak ada izin, maka pelanggaran hak cipta telah terjadi. Dalam hal ini, Undang-Undang memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menetapkan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan karya cipta mereka. Oleh karena itu, ketika seseorang mempublikasikan lagu melalui media sosial seperti melalui *YouTube*, maka mereka harus mempertimbangkan hak eksklusif pemilik hak cipta dan harus memperoleh izin terlebih dahulu sebelum memanfaatkan lagu tersebut.

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti oleh orang lain dari segi substansi, dan dijadikan oleh

peneliti sebagai bahan referensi sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021.”**

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak karya cipta berupa lagu yang dipublikasikan melalui media sosial (*Youtube*) Dihubungkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Daj Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*YOUTUBE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

metode yuridis normatif yang dimana yuridis normatif sebagai bentuk penelitian hukum yang memandang hukum sebagai norma khususnya yang berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, jurnal hukum, artikel, kajian-kajian hukum, dan media internet. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggambarkan metode yang dilakukan untuk mengetahui keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (*Youtube*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SuS-HKI/2021). Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang menggunakan Penalaran Hukum (problematis). Dalam Penalaran Hukum (problematis) menjelaskan penelusuran/penalaran atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Sehingga Penulis

dapat menguraikan data yang ada didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.SuS-HKI/2021.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (*Youtube*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak, karena perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum ini pada umumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis agar lebih mengikat dan menimbulkan sanksi yang harus dijatuhkan kepada yang melanggarnya. Perwujudan dari

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) *Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi*

perlindungan preventif yaitu peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Dalam hal ini pencipta lagu, dianjurkan untuk mendaftarkan hak cipta lagunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta, pencipta lagu memperoleh kepastian hukum dan hak eksklusif atas karyanya. Hal ini mempermudah dalam membuktikan kepemilikan hak cipta dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi lagu dari penggunaan yang tidak sah.

Dalam perkara Gen Halilintar tersebut, pada dasarnya hubungan hukum antara Gen Halilintar dengan Nagaswara muncul dari perbuatan Gen Halilintar yang memanfaatkan hak cipta milik Nagaswara. Hubungan hukum tersebut terwujud dengan didasari oleh Undang-Undang Hak

Cipta yang memberikan hak kepada pemegang hak cipta, dalam hal ini Nagaswara dalam penggunaan karya musik tersebut. Tidak ada pihak yang diperkenankan untuk memanfaatkan karya musik “Lagi Syantik” tersebut tanpa izin dari Nagaswara. Dalam hal ini, Gen Halilintar memanfaatkan karya musik tersebut tanpa izin dari Nagaswara, sehingga terdapat hubungan hukum yang jelas antara Gen Halilintar dengan Nagaswara.

Sehingga dengan demikian, Nagaswara tetap mempunyai untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap Gen Halilintar, walaupun Gen Halilintar tidak menerima keuntungan dalam penggunaan karya lagu “Lagi Syantik” tersebut. Karena faktanya sengekata antara Nagaswara dengan Gen Halilintar pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan peninjauan kembali pihak nagaswara serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, dengan menyatakan bahwa pihak Gen Halilintar terbukti melakukan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

pelanggaran hak cipta/hak moral berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena merubah lirik tanpa hak dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” dengan cara fiksasi, mengadakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan serta pendistribusian melalui media sosial. Sehingga perbuatan sebagaimana dimaksud pihak Nagswara mengalami kerugian materil. Dengan demikian akibat perbuatan dimaksud harus membayar kerugian kepada Nagaswara sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Perlu diketahui bahwa mengenai kerugian itu sendiri tidak hanya sekedar terbatas pada kerugian komersil, namun juga kerugian secara immateril dikarenakan menggunakan, memanfaatkan, atau mengubah lirik dari karya musik “Lagi Syantik”.

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual diperlukan karena hak kekayaan intelektual merupakan keberadaan daripada hak-hak yang lahir karena kreativitas intelektual manusia yang diwujudkan

dalam suatu karya yang nyata. Dimana dalam menciptakan suatu karya pencipta telah mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan pikirannya, apabila perlindungan tidak diberikan atas karya tersebut maka akan memudahkan peniruan yang dilakukan oleh pihak lain secara bebas yang tentunya merugikan para pencipta. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu penghargaan atas seseorang yang telah menuangkan idenya menjadi sebuah karya.

Hak kekayaan intelektual untuk perlindungan karya cipta menitikberatkan pada melindungi karya-karya kreatif seperti buku, musik, film, seni, dan karya-karya lain yang dihasilkan oleh pikiran dan imajinasi. Untuk lingkup perlindungannya memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengontrol reproduksi distribusi pameran dan pembuatan karya turunan dari karya cipta mereka. Hak karya cipta berlaku selama masa hidup pencipta ditambah jangka waktu tertentu setelah kematian atau

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

berdasarkan periode waktu tertentu setelah dipublikasikan karyanya.

Sedangkan hak kekayaan intelektual untuk perlindungan hak komersial lebih fokus pada melindungi aspek bisnis dan komersial dari suatu entitas seperti merek, paten, rahasia, dagang, dan hak desain industri. Untuk lingkup perlindungannya memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan menjual dan melindungi inovasi merek desain atau informasi bisnis tertentu agar tidak digunakan oleh pihak lain untuk jangka perlindungannya dapat bervariasi tergantung pada jenis hak komersial yang dimiliki. Jadi ringkasnya hak kekayaan intelektual untuk perlindungan karya cipta berfokus pada karya-karya kreatif dan memberikan kontrol atas penggunaan karya tersebut sementara hak kekayaan intelektual untuk perlindungan hak komersial lebih menitikberatkan pada aspek bisnis dan memberikan hak eksklusif terhadap merek, paten, rahasia dagang, dan desain industri.

Pemegang hak cipta adalah individu perusahaan atau badan hukum yang memiliki hak hukum untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas karya cipta. Pemegang hak cipta bisa menjadi pencipta itu sendiri atau dapat memperoleh hak cipta melalui perjanjian atau kepemilikan hak atas karya tersebut. Pemegang hak cipta cenderung memiliki kepentingan ekonomi dalam karya cipta tersebut mereka dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan atau lisensi karya serta memiliki hak untuk mencegah penggunaan tanpa izin atau pelanggaran hak cipta oleh orang lain.

Menurut analisa penulis dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah dapat melindungi hak-hak yang terdapat dalam pemegang hak cipta termasuk hak karya cipta, yang berarti bahwa hak eksklusif baik hak ekonomi dan hak moral yang ada dalam pencipta sudah dapat dilindungi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*YOUTUBE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang dibebeberapa Pasal membahas dan mengatur mengenai ciptaa pada perangkat digital, namun pengaturannya masih jauh dari kata sempurna. Adanya beberapa kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak cipta dalam *platform* digital menyebabkan kerugian untuk para pencipta hak cipta, upaya penjamin perlindungan hukum terhadap para pencipta suatu karya terutama pencipta lagu dan musik terhadap pelanggaran hak eksklusif oleh pihak lain dalam ranah hak cipta di era digital memerlukan beberapa pembaharuan terkait Undang-Undang hak cipta dan peraturan turunannya untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin memenuhi setiap lini kehidupan manusia, serta Undang-Undang sebagai garda terdepan para pencari keadilan dengan dihadapkan pada realita yang terjadi untuk menyelesaikan sengketa dalam hal hak

cipta, maka harus diberikan fondasi yuridis yang jelas, kuat, dan tegas.

Selain itu, untuk melindungi hak cipta *Youtube* juga mengatur mengenai bantuan dan pemecahan masalah ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Bantuan yang diberikan adalah *Youtube* akan melakukan penghapusan video yang diunggah tanpa izin dari pencipta atau telah melanggar hak cipta. Namun hal ini baru akan dilakukan oleh *Youtube* ketika *Youtube* menerima pemberitahuan adanya pelanggaran hak cipta. Pemberitahuan ini dikirimkan oleh pemegang hak cipta dengan cara mengisi formulir yang disediakan di website *Youtube*. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum bagi pencipta di situs *Youtube* masih lemah, karena jika tidak ada pelaporan dan pembuktian dari pemegang hak cipta maka video yang melanggar hak cipta tersebut akan tetap dapat dilihat dan didengar oleh pengguna *Youtube*.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhad

Dalam memutuskan setiap perkara dipersidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sewenang-wenang. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut, selain itu sebelum menjatuhkan putusan suatu perkara hakim harus melihat bukti-bukti maupun kesaksian para saksi yang dihadirkan pada persidangan. Dalam perkara hak cipta pada putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 PN Jakarta Pusat yang diputus oleh hakim memepertimbangkan dan mempunyai dasar hukum yang sudah ada. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut bahwa dengan memori Peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan memori peninjauan kembali.

Dalam perkara ini, yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 PN Jakarta Pusat, serta didasrkam pula pada

fakta-fakta, bukti-bukti, maupun keterangan saksi yang ada dalam persidangan demi terwujudnya kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa hak cipta mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

Selanjutnya ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a dan n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas buku dan terjemahan dalam pokok perkara, majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara ini. Selain itu Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan tanpa izin dari para Penggugat yang telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial penggandan atau plagiat atau menjiplak menggandakan hasil

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) *Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi*

karya intelektual Penggugat tanpa seijin Penggugat sebagai pemegang hak cipta, sebagaimana pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. pasal 40 ayat (1) huruf a dan n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Majelis menilai dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat seperti diuraikan dalam gugatannya, lalu gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR maupun pasal 185 BW, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya.

Penggugat telah mengajukan bukti surat terhadap lagu-lagu tersebut yang telah resmi didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Para Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari

sebuah karya cipta (musik dan lirik) yang berjudul “Lagi Syantik”, berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019, judul ciptaan “Lagi Syantik” yang untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan “00145341” yang dikeluarkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan analisa penulis dari penelitian putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didapatkan beberapa hal terkait dengan putusan Majelis Hakim tersebut, diantaranya bahwa dalam putusan Majelis Hakim harus dapat memenuhi unsur kepastian hukum bagi para pihak, baik itu Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat. Maka dari hal tersebut, sebelum menjatuhkan putusan perkara hak cipta ini hakim lebih dahulu mempertimbangkan aspek kepentingan dari seluruh pihak yang terlibat dengan demikian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*YOUTUBE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

berlakunya hukum bagi pihak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat karena karyanya digunakan tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak tersebut, apalagi Tergugat menggunakan lagu tersebut untuk dikomersialisasi dan mendapat keuntungan dari hal tersebut, kerugian yang dialami bukan hanya hak ekonomi saja, melainkan ada hak moral pada suatu ciptaan, ditambah lagu-lagu tersebut sudah dipatenkan dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Menurut analisa penulis dalam putusan Majelis Hakim menghukum para Tergugat karena terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu yaitu dengan kegiatan publikasian tanpa izin pencipta yang termasuk perbuatan melawan hukum, selain itu Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta

seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Selanjutnya pada perlindungan hukum terhadap Penggugat yang telah dirugikan karena lagunya digunakan tanpa izin oleh Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan putusan yang sudah sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini terlihat pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/ atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara. .Ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan atau penggunaan secara komersial Ciptaannya. Ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

dan b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas buku dan terjemahan.

Menurut analisa penulis bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan penggandaan atau plagiat atau menjiplak menggandakan hasil karya intelektual Penggugat tanpa seijin Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta, sebagaimana pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo. pasal 40 ayat (1) huruf a dan n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dikarenakan Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Majelis agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun imateril. Maka hakim memutuskan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi

sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu majelis mempertimbangkannya bahwa Penggugat untuk dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun imateril berdasarkan bukti yang ada, dimana PT. Nagaswara Official (Penggugat) dengan Halilintar Anofial Asmid (Tergugat) telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu “Lagi Syantik”, melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul “Lagi Syantik” dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat melalui akun youtube genhalilintar milik Para Tergugat sehingga diterima oleh publik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (*YOUTUBE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

Sehingga tuntutan Penggugat tentang kerugian tersebut dengan mengacu pada bukti tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberikan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan pada putusan tersebut, hasil analisa penulis memiliki kesamaan pendapat dengan hakim yang memutus perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 PN Jakarta Pusat karena telah mengabulkan gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selain itu Tergugat juga terbukti menggunakan lagu lalu

mempublikasikannya kedalam media sosial dan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada putusan di tingkat Peninjauan Kembali, menurut penulis Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum dan Keadilan bagi penggugat sebab penggugat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karyanya dikarenakan karyanya tersebut juga telah terdaftar pada website data kekayaan intelektual milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut.

KESIMPULAN

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap hak karya cipta bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah dapat melindungi hak-hak yang terdapat dalam pemegang hak cipta termasuk hak karya cipta, yang berarti bahwa hak eksklusif baik hak ekonomi dan hak moral yang ada dalam pencipta sudah dapat dilindungi dengan berlakunya Undang-

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt Sus-HKI/2021, antara PT NAGASWARA PUBLISHERINDO dan Gen Halintar, menurut peneliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka yang dimana Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selain itu Tergugat juga terbukti menggunakan lagu lalu mempublikasikannya kedalam media sosial dan melanggar ketentuan Pasal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Atsar, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Aris Prio Agus Santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2021.

Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Budi Santoso, dkk, *Masalah-Maalah HKI Kontemporer*, Penerbit Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2022.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta Harvarindo, 2012.

Haenju dan Armillah, *Pengetahuan Seni Musik*, Mutiar, Jakarta, 1981.

Hariyani dan Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Kukuh Prakoso, 2009, *Lebih Kreatif dengan Youtube*, YANDI, Yogyakarta, 2009.

Martin Eka Dwi Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2021.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lainnya

1. Skripsi

Muhammad Reyhan Zaky, “Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Maulana Malikn Ibrahim Malang, Tahun 2019.

Tri Dodi Setyawan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Di Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Islam Negeri Jakarta, Tahun 2020.

2. Jurnal

Christine C. Salindelo, *Perlindungan Musik dan Lagu di Era teknologi*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA CIPTA BERUPA LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021) Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi

Internet dalam Perspektif Undang-Undang Hak cipta di indonesia, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V. No. 5 Juli 2017.

Dalam Perspektif dan HAK Asasi, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, No. 3, 2019, hlm 69–84.

Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, *Youtube sebagai sarana Komunikasi bagi Komunitas Makassar*, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2016.

Sulthon Miladiyanto, *Royalti Lagu? musik untuk kepentingan Komersial dalam upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, Rechtldee

Jurnal Hukum, Vol. 10. No.1, Juni 2015.

3. Webiste

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 10 Maret 2023.

<https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 11 maret 2023.

<http://Www.Landasanteori.Com/2015/09/Pengertian-Hak-Cipta-Definisi-Menurut.Html>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2023.

<http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedia/lainnya/buku-panduan-hki/> diakses tanggal 10 April 2023.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-cipta-musik-dan-perlindungannya> diaskes pada tanggal 10 April 2023.